

DELIK HUKUM

Merajut Persatuan Di Perbatasan, Satgas Yonif 512/QY Terus Jalin Tali Asih Di Tengah Masyarakat

Jefri Jayapura - PAPUA.DELIKHUKUM.ID

Jan 4, 2025 - 16:56



MERAJUT PERSATUN DI PERBATASAN, SATGAS YONIF 512/QY TERUS JALIN TALI ASIH DI TENGAH MASYARAKAT

Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua – Dalam rangka menjaga dan memastikan keamanan di wilayah perbatasan, Satgas Yonif 512/QY melalui Pos

Kiwirok terus berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengkampanyekan pentingnya persatuan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat yang multikultural dan memiliki keberagaman. Sabtu, (4/1/2025).

Satgas Yonif 512/QY aktif mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga persatuan, serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya konflik dan pentingnya menjaga keharmonisan antar kelompok. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga stabilitas sosial, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadinya ketegangan sosial.

Dukungan dari masyarakat sekitar terhadap kehadiran Satgas Yonif 512/QY juga sangat positif. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan, serta kerjasama yang terjalin antara aparat keamanan dan masyarakat setempat dalam menjaga kedamaian.

"Keamanan kami di Kiwirok semakin terjamin dengan adanya Bapa-bapa dari TNI dan Polri. Bapa-Bapa TNI dan Polri disini tidak hanya menjaga kami dari ancaman luar, tetapi juga mempererat hubungan dengan masyarakat," ungkap seorang tokoh masyarakat setempat, Bapa Adolf, yang mengapresiasi peran aktif TNI/POLRI di wilayah tersebut.

Dengan langkah-langkah ini, Satgas Yonif 512/QY berharap dapat terus menjalin tali persaudaraan yang kuat dengan masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga tercipta situasi yang kondusif dan damai. Selain itu, pada kesempatan ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, khususnya di daerah yang terletak jauh dari pusat pemerintahan.